

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1998  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Kelima pelaksanaan rencana pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
- d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999;
- e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

**Mengingat :**

1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan Negara adalah semua Penerimaan Dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan yang digunakan untuk membiayai Belanja Negara;
2. Penerimaan Dalam Negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak;
3. Penerimaan Pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja Negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran Rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran Pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa Kredit Anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa Anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan Program;
10. Bantuan Program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
11. Bantuan Proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari :
  - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
  - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp 114.965.800.000.000,00;
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp 32.255.000.000.000,00;

- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 147.220.800.000.000,00.

#### Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- Penerimaan perpajakan sebesar Rp 66.040.000.000.000,00;
  - Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 34.581.700.000.000,00;
  - Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 14.344.100.000.000,00.
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- Bantuan Program sebesar Rp 8.000.000.000,00;
  - Bantuan Proyek sebesar Rp 23.755.000.000,00.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari :
- Pengeluaran Rutin;
  - Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 97.829.100.000.000,00;
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 49.391.700.000.000,00;
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 147.220.800.000.000,00.

#### Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :
- |    |  |    |                       |
|----|--|----|-----------------------|
| 01 | 01 Sektor industri sebesar   | Rp | 83.385.209.000,00     |
| 02 | 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar  | Rp | 627.724.191.000,00    |
| 03 | 03 Sektor pengairan sebesar  | Rp | 38.416.795.000,00     |
| 04 | 04 Sektor tenaga kerja sebesar   | Rp | 318.069.481.000,00    |
| 05 | Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar                                 | Rp | 59.790.615.612.000,00 |
| 06 | Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar   | Rp | 329.700.829.000,00    |
| 07 | Sektor pertambangan dan energi sebesar   | Rp | 318.933.498.000,00    |
| 08 | Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar  | Rp | 117.207.539.000,00    |
| 09 | Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar   | Rp | 12.485.462.070.000,00 |
| 10 | Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar   | Rp | 357.912.413.000,00    |
| 11 | Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar | Rp | 4.740.026.958.000,00  |
| 12 | Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar   | Rp | 331.654.091.000,00    |
| 13 | Sektor kesejahteraan sosial kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar                                 | Rp | 705.289.102.000,00    |
| 14 | Sektor perumahan dan pemukiman sebesar   | Rp | 22.813.072.000,00     |
| 15 | Sektor agama sebesar   | Rp | 1.303.622.987.000,00  |
| 16 | Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar  | Rp | 409.502.164.000,00    |
| 17 | Sektor hukum sebesar   | Rp | 755.062.877.000,00    |
| 18 | Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar  | Rp | 5.227.096.572.000,00  |
| 19 | Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar                           | Rp | 2.317.439.243.000,00  |
| 20 | Sektor pertahanan dan keamanan sebesar   | Rp | 7.549.165.297.000,00  |
- (2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dirinci menurut sektor :
- |    |  |    |                      |
|----|--|----|----------------------|
| 01 | Sektor industri sebesar  | Rp | 697.317.300.000,00   |
| 02 | Sektor pertanian dan kehutanan sebesar   | Rp | 2.756.883.700.000,00 |
| 03 | Sektor pengairan sebesar   | Rp | 3.336.074.400.000,00 |
| 04 | Sektor tenaga kerja sebesar  | Rp | 1.324.921.800.000,00 |
| 05 | Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar                                 | Rp | 830.686.300.000,00   |
| 06 | Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar   | Rp | 8.500.814.400.000,00 |
| 07 | Sektor pertambangan dan energi sebesar   | Rp | 6.085.230.700.000,00 |
| 08 | Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar  | Rp | 1.215.437.500.000,00 |
| 09 | Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar   | Rp | 8.310.359.400.000,00 |
| 10 | Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar   | Rp | 798.871.500.000,00   |
| 11 | Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar | Rp | 5.475.240.900.000,00 |
| 12 | Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar   | Rp | 587.546.000.000,00   |
| 13 | Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar                                | Rp | 2.426.268.200.000,00 |

14	Sektor perumahan dan pemukiman sebesar	Rp 1.940.603.000.000,00
15	Sektor agama sebesar	Rp 374.600.000.000,00
16	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp 1.122.811.400.000,00
17	Sektor hukum sebesar	Rp 186.735.500.000,00
18	Sektor aparaturnegara dan pengawasan sebesar	Rp 919.499.300.000,00
19	Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp 378.982.000.000,00
20	Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp 2.122.816.700.000,00

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

#### Pasal 6,

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 7

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ke dalam program dan proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 8

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1998/1999 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai :
  - a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
  - b. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
  - c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
  - d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
  - e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
  - f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah;
- (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999.

#### Pasal 9

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1999/2000 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1999/2000;
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1999/2000.

#### Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1998/1999 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1998/1999 berakhir.

#### Pasal 12

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1998/1999 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1998/1999 berakhir.

#### Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 1998  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 1998  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd  
MOERDIONO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 66**

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1998  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

UMUM

Pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang arah kebijaksanaannya ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan. Arah kebijaksanaan pembangunan tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sedangkan pelaksanaan operasional tahunannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian hal-hal yang dituangkan dalam APBN senantiasa sejalan dengan arah kebijaksanaan GBHN maupun Repelita.

Dalam hubungan itu, sejak dimulainya pembangunan secara berencana pada tahun 1969, pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta pembangunan bidang-bidang lainnya telah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, dan secara bertahap berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Repelita VI sebagai awal dari periode pembangunan jangka panjang kedua hasil-hasil pembangunan tersebut terus diperbarui, diperdalam, dan diperluas dengan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Adapun pelaksanaannya didasarkan pada nilai luhur dan pengamalan semua sila Pancasila sebagai kesatuan yang utuh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 98/99, yang merupakan APBN tahun kelima Repelita VI, merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan, dan pembaharuan pembangunan, yang mencerminkan tekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta makin berkualitas, dengan memberikan prioritas kepada pembangunan ekonomi, dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Repelita VI. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 1998/1999 juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, baik internal maupun eksternal, seperti pertumbuhan ekonomi dunia, harga minyak di pasar internasional, fluktuasi nilai tukar mata uang dunia, serta perkembangan suku bunga internasional.

APBN Tahun Anggaran 1998/1999 tetap menganut prinsip anggaran berimbang yang dinamis, yang pada dasarnya mengandung arti bahwa jumlah pengeluaran tidak melebihi jumlah penerimaan dan diupayakan dibentuknya tabungan Pemerintah yang semakin meningkat. Prinsip tersebut memungkinkan dibentuknya dana cadangan apabila penerimaan negara melebihi yang direncanakan, dan dimanfaatkan dana tersebut pada masa penerimaan kurang dari yang direncanakan atau tidak cukup mendukung program yang telah direncanakan dan atau yang sangat mendesak sehingga terjamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh stabilitas ekonomi yang mantap.

Pembentukan tabungan Pemerintah, yang merupakan selisih antara Penerimaan Dalam Negeri dan Pengeluaran Rutin, sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pemupukan investasi dari sektor Pemerintah yang bersama-sama dengan investasi dari sektor swasta, mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan bantuan luar negeri, sepanjang tidak memiliki ikatan politik dan tidak memberatkan perekonomian nasional, masih dapat dipergunakan sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan. Dalam rangka menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri di luar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara. Untuk itu, pelaksanaan Undang-undang baru di bidang pajak 1994, yang

merupakan penyempurnaan atas Undang-undang di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diberlakukan sejak Januari 1995 akan semakin diintensifkan. Dalam kaitan ini, telah disahkan Undang-undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang akan mulai berlaku sejak 1 Juli 1998. Selain itu, dalam rangka menghadapi era globalisasi dalam perdagangan internasional di masa-masa mendatang, di bidang kepabeanan dan cukai juga telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 April 1996. Dengan berlakunya kedua undang-undang ini, maka Indonesia telah melangkah lebih maju di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu dengan meninggalkan aturan warisan kolonial yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, dalam rangka penertiban pengelolaan penerimaan negara bukan pajak telah disahkan Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dilaksanakan secara bertahap sejak tanggal 23 Mei 1997. Sedangkan penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri direncanakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendapat prioritas tinggi, terutama yang meningkatkan ekspor nonmigas. Di bidang Belanja Negara, terus diupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai jenis Pengeluaran Rutin melalui penghematan beberapa pos pengeluaran, namun dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, percepatan pembayaran hutang luar negeri akan terus diupayakan yang dananya diperoleh dari hasil penjualan saham Pemerintah dari BUMN dan atau dari Sisa Anggaran Lebih. Di bidang Pengeluaran Pembangunan, kebijaksanaan alokasi anggaran belanja pembangunan diupayakan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan skala prioritas seperti yang tertuang dalam Repelita VI. Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan nasional, serta penciptaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, penibangunan daerah yang masih tertinggal, terutama di Kawasan Timur Indonesia, serta pembangunan berbagai sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pengairan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh para

investor, tetap memperoleh perhatian yang besar. Dalam rangka mempersempit kesenjangan pembangunan antar daerah dan menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, alokasi anggaran bagi sektor pembangunan daerah dan transmigrasi semakin ditingkatkan, khususnya penyediaan dana Inpres Daerah Tingkat II dan Inpres Desa Tertinggal, serta Inpres Program Makanan Tambahan Anak Sekolah untuk daerah tertentu dalam batas-batas kemampuan keuangan negara.

Demi terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan berbagai jenis usaha swasta di berbagai daerah serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, baik di sektor riil maupun sektor nonriil terus dilanjutkan. Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, maka penertiban keuangan negara, baik pendapatan maupun belanja, perlu terus ditingkatkan termasuk pengawasannya.

Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999 dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1999/2000, dan menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1998/1999 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut :

- a. bahwa keadaan ekonomi global diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah;
- b. bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan mulai mengalami proses pemulihan dari goncangan moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara sejak Juli 1997;
- c. bahwa harga minyak bumi di pasaran internasional menunjukkan perkembangan yang baik;
- d. bahwa kesinambungan pembangunan perlu dipertahankan dengan terus meningkatkan pengalangan sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas alam, sehingga peranan Penerimaan Dalam Negeri di dalam pembiayaan pembangunan dapat terus ditingkatkan;
- e. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, perlu terus ditingkatkan;
- f. bahwa program pemerataan kesejahteraan terutama dalam menikmati hasil pembangunan bagi masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih besar.

## PASALDEMIPASAL

### Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### Pasal 2

Ayat(1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

	(dalam rupiah)
Penerimaan perpajakan sebesar	66.040.000.000.000,00
terdiri dari :	
0110 Pajak Penghasilan (PPh)	25.618.000.000.000,00
0120 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)	27.872.000.000.000,00
0140 Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB)	3.411.000.000.000,00
0210 Bea masuk	3.562.000.000.000,00
0220 Cukai	4.922.000.000.000,00
0230 Pungutan (pajak) ekspor	115.000.000.000,00
0240 Bea meleraai	540.000.000.000,00
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam	34.581.700.000.000,00
terdiri dari :	
0310 Penerimaan minyak bumi	24.060.900.000.000,00
0320 Penerimaan gas alam	10.520.800.000.000,00
Penerimaan negara bukan pajak sebesar	
terdiri dari :	
0410 Pendapatan pendidikan	94.675.400.000,00

	0411	Uang pendidikan	93.960.200.000,00
	0412	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	715.200.000,00
0480		Pendapatan pendidikan swadana	503.103.900.000,00
	0481	Pendapatan pendidikan swadana	503.103.900.000,00
0510		Penjualan hasil produksi, sitaan	23.145.300.000,00
	0511	Penjualan hasil pertanian, perkebunan	1.221.500.000,00
	0512	Penjualan hasil peternakan	10.479.400.000,00
	0513	Penjualan hasil perikanan	811.700.000,00
	0514	Penjualan hasil sitaan	3.000.000.000,00
	0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi	129.000.000,00
	0516	Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	617.900.000,00
	0517	Penjualan dokumen-dokumen pekelangan	6.342.100.000,00
	0519	Penjualan lainnya	543.700.000,00
0520		Penjualan aset tetap	14.626.200.000,00
	0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	720.800.000,00
	0522	Penjualan kendaraan bermotor	166.500.000,00
	0523	Penjualan sewa beli	12.500.100.000,00
	0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	1.238.800.000,00
0530		Pendapatan sewa	9.561.700.000,00
	0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	4.219.600.000,00
	0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	1.827.900.000,00
	0533	Sewa benda-benda bergerak	2.837.800.000,00
	0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	676.400.000,00
	0540	Pendapatan jasa I	507.557.500.000,00
	0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	8.975.000.000,00
	0542	Pendapatan tempat hiburan, taman, museum	241.000.000,00
	0543	Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB	135.000.000.000,00
	0544	Pendapatan jasa pertanahan	77.854.000.000,00
	0545	Pendapatan hak dan perizinan	236.725.200.000,00
	0546	Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	7.017.800.000,00
	0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan	4.652.600.000,00
	0548	Pendapatan jasa kantor urusan agama	6.000.000.000,00
	0549	Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan	30.291.900.000,00
	0550	Pendapatan jasa II	324.982.200.000,00
	0551	Pendapatan jasa lembaga, keuangan (jasagiro)	31.189.500.000,00
	0552	Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	170.714.000.000,00
	0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	2.500.000.000,00
	0554	Pendapatan jasa kantor catatan sipil	11.765.000.000,00
	0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	1.751.000.000,00
	0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	250.000.000,00
	0557	Bea lelang	32.000.000.000,00
	0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negaradan lelang negara	50.000.000.000,00
	0559	Pendapatan jasa lainnya	24.812.700.000,00
0560		Pendapatan rutin dari luar negeri	19.500.000.000,00
	0561	Bea visa dan paspor	4.000.000.000,00
	0562	Bea konsuler	4.000.000.000,00
	0569	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	11.500.000.000,00
0580		Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadaya	1.837.896.100.000,00
	0581	Pendapatan penjualan swadana	11.393.100.000,00
	0582	Pendapatan sewa swadana	1.634.400.000,00
	0583	Pendapatan jasa swadana	1.824.868.600.000,00
0610		Pendapatan kejaksaan dan peradilan	20.355.000.000,00
	0611	Legalisasi tanda tangan	80.000.000,00
	0612	Pengesahan surat di bawah tangan	50.000.000,00
	0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	2.075.000.000,00
	0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	11.700.000.000,00
	0615	Ongkos perkara.	250.000.000,00
	0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	5.200.000.000,00
0710		Pendapatan dari investasi	5.425.000.000.000,00
	0711	Bagian laba dari BUMN	1.925.000.000.000,00
	0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)	3.500.000.000.000,00
0810		Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan	36.691.900.000,00
	0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.227.100.000,00
	0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonomi	3.000.000.000,00
	0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	2.000.000.000,00

0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	30.095.300.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	369.500.000,00
0820	Pendapatan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	2.739.300.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.288.600.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	215.500.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangun:lan rupiah lainnya	1.235.200.000,00
0880	Pendapatan lain-lain swadana	5.000.000.000,00
0881	Pendapatan lain-lain swadana	5.000.000.000,00
0890	Pendapatan lain-lain	5.519.265.500.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	836.400.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	2.527.300.000,00
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi	1.626.400.000,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN	200.000.000.000,00
0899	Pendapatan anggaran lainnya	5.314.275.400.000,00

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

**Pasal 4**

Ayat(1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 5**

Ayat (I)

Cukup jelas

Ayat (2)

(dalam rupiah)

Pengeluaran rutin sebesar	97.829.100.000.000,00
terdiri dari :	
01 SEKTOR INDUSTRI	83.385.209.000,00
01.1 Subsektor Industri	83.385.209.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	627.724.191.000,00
02.1 Subsektor Pertanian	207.325.806.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan	420.398.385.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN	38.416.795.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	20.107.020.000,00
03.2 Subsektor Irigasi	18.309.775.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	318.069.481.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja	318.069.481.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	59.790.615.612.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	79.508.368.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	60.832.373.000,00
05.4 Subsektor Keuangan	59.549.309.047000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	100.965.824.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	329.700.829.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan`	33.304.583.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat	28.587.635.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut	148.476.497.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara	64.155.748.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	55.176.366.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	318.933.498.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan	313.506.408.000,00
07.2 Subsektor Energi	5.427.090.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	117.207.539.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata	21.511.157.000,00



08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi	95.696.382.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	12.485.462.070.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	12.403.046.551.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	82.415.519.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	357.912.413.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup	9.456.675.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang	348.455.738.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN Y ANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.740.026.958.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan	4.253.886.891.000,00
11 .2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	370.137.314.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	104.132.579.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga	11.870.174.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	331.654.091.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	331.654.091.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	705.289.102.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial	137.509.102.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan	567.780.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	22.813.072.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman	15.847.769.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	6.965.303.000,00
15 SEKTOR AGAMA	1.303.622.987.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	200.338.062.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.103.284.925.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	409.502.164.000,00
16.1 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	263;877.083.000,00
16.2 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	39.595.541.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan	2.570.420.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	103.459.120.000,00
17 SEKTOR HUKUM	755.062.877.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	663.020.419.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	92.042.458.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGA W ASAN	5.227.096.572.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara	4.905.510.940.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	321.585.632.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMU- NIKASI DAN MEDIA MASSA	2.317.439.243.000,00
19.1 Subsektor Politik	105.010.313.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	1.663.592.842.000,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	548.836.088.000,00
20 SEKTOR PERTANIAN DAN KEAMANAN	7.549.165.297.000,00
20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	7.176.318.410.000,00
20.3 Subsektor Pendukung	372.846.887.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

(dalam rupiah)

Pengeluaran pembangunan sebesar yang terdiri dari : Rp49.391.700.000.000,00

	Nilai Rupiah Rupiah	Banluan Proyek dan Kredit Ekspor	Jumlah
01 SEKTOR INDUSTRI :	16.121.000.000,00	481.196.300.000,00	697.317.300.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	1.729.185.000.000,00	1.027.598.700.000,00	2.156.883.100.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN	1.149.888.000.000,00	2.086.186.400.000,00	3.336.074.400.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	1.117.313.000.000,00	147.608.800.000,00	1.324.921.800.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	206.420.000.000,00	624.266.320.000,00	830.686.300.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEO- ROLOGI DAN GEOFISIKA	3.846.852.000.000,00	4.653.962.400.000,00	8.500.814.400.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN			

DAN ENERGI	947.264.000.000,00	5.137.966.700.000,00	6.085.230.700.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS			
DAN TELEKOMUNIKASI	86.710.000.000,00	1.128.727.500.000,00	1.215.437.500.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH			
DAN TRANSMIGRASI	7.374.450.000.000,00	935.909.400.000,00	8.310.359.400.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan			
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP			
DAN T A TA RUANG	391.853.000.000,00	407.018.500.000,00	798.871.500.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN. KE8UDAYAAN			
NASIONAL, KEPERCAY AAN TERHADAP			
TUHANY ANG MAHA ESA, PEMUDA			
DAN OLAH RAGA	1.341.629.000.000,00	2.133.611.900.000,00	5.475.240.900.000,00
12 SEKTOR KEPENDVUDUKAN DAN			
KELUARGA SEJAHTERA	303.941.000.000,00	283.605.000.000,00	587.546.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,			
KESEHATAN, PERANAN WANITA,			
ANAK DAN REMAJA	1.452.098.000.000,00	974.170.200.000,00	2.426.268.200.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN			
PERMUKIMAN	473.113.000.000,00	1.467.490.000.000,00	1.940.603.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA	209.350.000.000,00	165.250.000.000,00	374.600.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN			
DAN TEKNOLOGI	615.971.000.000,00	506.840.400.000,00	1.122.811.400.000,00
17 SEKTOR HUKUM	176.798.000.000,00	9.937.500.000,00	186.735.500.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA			
DAN PENGAWASAN	574.689.000.000,00	344.810.300.000,00	919.499.300.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR			
NEGERI, PENERANGAN. KOMUN-			
KASI DAN MEDIA MASSA	140 162.000.000,00	238.820.000.000,00	378.982.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN			
KEAMANAN	1.122.793.000.000,00	1.000.023.700.000,00	2.122.816.700.000,00

**Pasal 6**

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1998.

**Pasal 7**

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1998.

**Pasal 8**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e dan f

Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Peingeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukupjeias

Ayat(4)

Cukup jefas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayal (2)

Cukup jelas

**Pasal 10**

Apabila pada akhir tahun anggaran 1998/1999 terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa lersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dapat dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 13**

Pasal-pasal Indische Comtabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku adalah :

1. Pasal 2 Ayal (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
2. Pasal 2 Ayal (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

**Pasal 14**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3750**

Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1998, Buku 2.